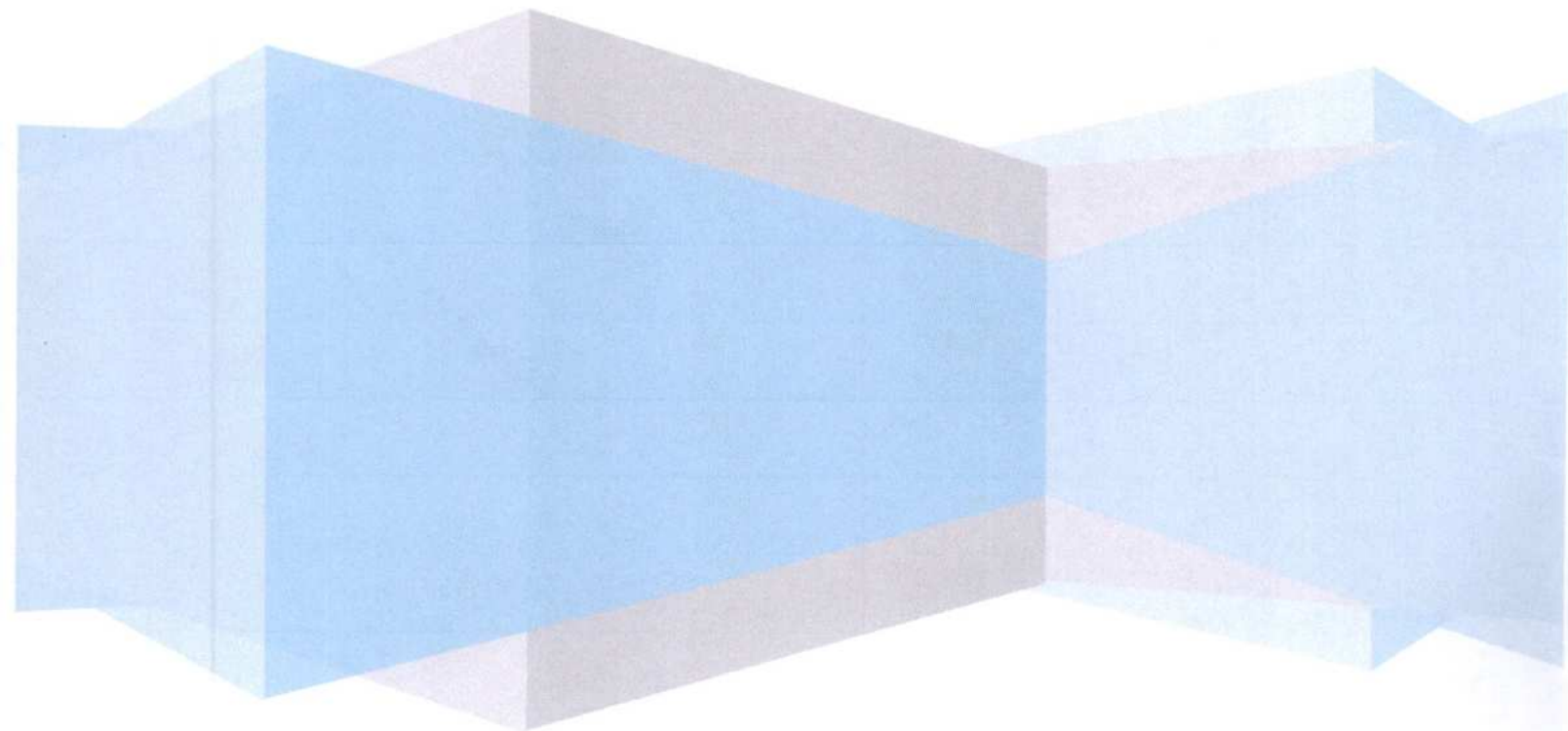


KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
LAPORAN KEUANGAN AUDITED
TAHUN 2025



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov DKI Jakarta
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Laporan Keuangan tingkat UAKPA Audited
Untuk Periode Tahun 2025



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 30 April 2026

Sekretaris,



SHOLEHUDIN ZUHRI

NIP. 198508162010121004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 143/KU.03.2-SR/3174/2026

Laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited periode 31 Desember 2025 Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta. 4 Mei 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Jakarta Selatan,



Sholehudin Zuhri

NIP. 198508162010121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN.....	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	17
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	24
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	36
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	43
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	46
VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR	48
A. Laporan Keuangan Cetakan SAKTI	48
B. Surat Hasil Rekonsiliasi	49
C. Berita acara Rekonsiliasi Internal	50
D. Laporan Pertanggungjawab Bendahara	55
E. Memo Penyesuaian Jurnal	56
F. Telaah	57

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode Per 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 656,200,000. atau mencapai 0 persen. Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 87,379,682 atau mencapai 65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1,185,169,489 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar nihil; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 1,184,919,489; dan Aset Lainnya (neto) setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp 250,000 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1,185,169,489.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisitLO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 5,347,076,982 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 0 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (656,200,000) dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (4,690,876,982).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2,988,770,360 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (4,690,876,982) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0. dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1,078,533,930 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 1,793,816,280

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi dikurangi Anggaran	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	656,200,000	656,200,000	0%	87,379,682
Jumlah Pendapatan Dan Hibah		-	-	-	0%	87,379,682
Belanja						
Belanja Pegawai		3,014,643,000	1,615,996,502	(1,398,646,498)	53.60	129,946,369,631
Belanja Barang		262,406,000	118,737,428	(143,668,572)	45.25	128,458,534,343
Belanja Modal		26,148,000	0	(26,148,000)	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		3,303,197,000	1,734,733,930	(1,568,463,070)	52.52%	129,946,369,631

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET		-	-
ASET LANCAR		-	-
Kas di bendahara pengeluaran		15,000,000	0
Kas di Bendahara Penerimaan		586,666,666	1,466,666,666
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Piutang Jangka Pendek		-	-
Beban dibayar dimuka		0	564,477,888
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		(0)	(563,727,888)
Persediaan		0	750,000
JUMLAH ASET LANCAR		0	1,466,666,666
ASET TETAP			
Tanah			
Peralatan dan Mesin		3,347,951,579	3,322,366,079
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		398,015,000	398,015,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(2,378,438,143)	(2,199,027,385)
JUMLAH ASET TETAP		1,341,942,936	1,521,353,694
PIUTANG JANGKA PANJANG		1,793,816,280	2,988,770,360
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi		1,793,816,280	2,988,770,360
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		1,793,816,280	2,988,770,360
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		1,944,109,602	2,988,770,360
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	0
ASET LAINNYA			1,466,666,666
Aset tak berwujud		-	1,466,666,666
Aset lain-lain		564,477,888	564,477,888
Akumulasi penyusutan/amortisasi Aset lainnya		(563,977,888)	(563,977,888)
JUMLAH ASET LAINNYA		500,000	750,000
JUMLAH ASET		1,944,109,602	2,988,770,360
KEWAJIBAN		-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
Uang muka dari KPPN		0	-
Utang kepada pihak ketiga		19,257,000	-
Pendapatan diterima dimuka		15,000,000	-
Beban yang masih harus dibayar		0	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		19,257,000	
JUMLAH KEWAJIBAN		-	
EKUITAS		1,165,912,489	2,988,770,360
Ekuitas		1,165,912,489	2,988,770,360
JUMLAH EKUITAS		1,165,912,489	2,988,770,360
JUMLAH KEWAJIAN DAN EKUITAS		1,185,169,489	2,988,770,360

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(Dalam rupiah)

U R A I A N	Cat.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai		1,740,635,294	1,614,574,006
Beban Persediaan		0	0
Beban Barang dan Jasa		977,709,398	107,474,599,749
Beban Pemeliharaan		31,682,560	55,915,454
Beban Perjalanan Dinas		0	20,532,576,380
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat		0	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi		179,660,758	296,136,681
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		2,929,688,010	129,706,761,829
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,929,688,010)	(129,706,761,829)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		656,200,000	87,379,682
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		656,200,000	87,379,682
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		656,200,000	87,379,682
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,273,488,010)	(129,706,761,829)
POS LUAR BIASA		-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(2,273,488,010)	(129,706,761,829)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catat an	2025	2024
EKUITAS AWAL		2,988,770,360	10,145,765,290
SURPLUS/DEFISIT-LO		(2,273,488,010)	(129,706,761,829)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1,078,533,930	133,249,927,768
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,194,954,080)	3,543,165,939
EKUITAS AKHIR		1,793,816,280	13,688,931,229

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil, Kebijakan Satker Transaksi Khusus KPPN Jakarta IV dan Dasar Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum yang didirikan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

dengan misi "mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) rencana strategis sebagai berikut:

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tingkat UAKPA Unaudited Per 30 Juni Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi dan Keuangan Tingkat Instansi berbasis akrual yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal 1n1 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jakarta Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tingkat UAKPA Unaudited Per 30 Juni Tahun 2025 telah mengacu pada PMK 232/PMK.05/2022. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasardasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan . Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ a tau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berd asarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan diadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4,180,420,572.- Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang disebabkan adanya Refocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB		
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	3,140,073,056	3,140,073,056
Belanja Barang	1,773,447,661	1,773,447,661
Belanja Modal	26,148,000	26,148,000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	4,180,420,572	4,180,420,572

Realisasi
Pendapatan
Rp87,379,682

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp87,379,682 atau mencapai 71 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran Awal	Realisasi	%
Pendapatan	-	656,200,000	65%
Jumlah Belanja	-	656,200,000	

Realisasi Belanja
Negara Rp
3,303,197,000

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3,303,197,000 sedangkan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp131,731,874,401. Perbandingan antara realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,303,197,000	1,615,996,502	53%
Belanja Barang	262,406,000	118,737,428	45%
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3,303,197,000	1,734,733,930	52%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar 52 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Menurunnya Belanja Modal yang direalisasikan untuk perluasan lahan yang akan diperuntukkan sebagai pengembangan gedung pelayanan dan perkantoran serta area untuk aktivitas perkantoran. Peningkatan juga dikarenakan adanya renovasi atas gedung pelayanan.
- 2. Menurunnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.
- 3. Meningkatnya Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	3,303,197,000	2,661,201,350	53%
Belanja Barang	262,406,000	129,070,673,051	45%
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3,303,197,000	131,731,874,401	52%

Belanja Pegawai
Rp3,140,073,056

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,140,073,056 dan Rp2,650,801,350 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 53 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1. Adanya penerimaan pegawai PPPK dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
- 2. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari CPNS masuk pegawai tahun 2025 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024.

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,615,996,502	2,661,201,350	53%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	1,615,996,502	2,661,201,350	53%

Realisasi Belanja
Barang
Rp262,406,000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,773,447,661 dan Rp128,458,534,343 Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Penurunan 45% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Berkurangnya belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama,
2. Peningkatan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan,
3. Peningkatan Belanja Jasa Profesi untuk mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat, dan
4. Peningkatan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah.
5. Tidak ada Tahapan Pemilihan Umum Tahun di 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	118,737,428	128,458,534,343	99%
Jumlah Belanja Kotor			
Jumlah Belanja	118,737,428	128,458,534,343	99%

Belanja Modal
Rp26,148,000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. rencana peningkatan kapasitas kerja Satker Kantor Akuntansi beberapa tahun kemudian sehingga perlu membeli lahan baru untuk pembangunan Gedung Kantor nantinya. Selain itu, peningkatan belanja modal disebabkan adanya renovasi Gedung Kantor, pembelian peralatan yang akan digunakan pada gedung yang sudah selesai direnovasi clan untuk peningkatan fasilitas jaringan untuk menunjang pelaksanaan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0%
Belanja Modal Gedung dan	-	-	-

Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	0	0%

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Gedung pelayanan clan area untuk aktivitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2025 dan 2025

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp25,585,500

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp25,585,500, dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung untuk gedung yang selesai direnovasi.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Komputer Unit / Personal Komputer	10,750,000	-	99%
Air Conditioning (AC)	-	-	-
Meja dan Kursi	-	-	-
Printer 3 buah @4.100.000	14,300,000	-	99%
Smart TV 86 Inch	-	-	-
Smart TV 50 Inch	-	-	-
Proyektor	-	-	-
Layar Proyektor Motorik	-	-	-
Transmitter Receiver Video HDMI	-	-	-

Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-	-
Video Monitor	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	25,585,500	-	-

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah Gedung dan masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi Gedung Kantor untuk para pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 Jalan, Irigasi dan dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jaringan radio untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial

merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

c. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp601,666,666

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp601,666,666 dan Rp1,466,666,666 . Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp15,000,000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15,000,000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	4,345,470	-
Rekening Bank	10,654,530	-
Jumlah	15,000,000	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari

pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA
2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

<i>Piutang Pajak Rp0</i>	C.1.4. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.
--------------------------	---

<i>Bagian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0</i>	C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
---	---

<i>Bagian Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
--	---

<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Pendek Rp0</i>	C. 1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0 sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing dehitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih herdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:
--	---

Tabel. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,5 %	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,5 %	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,5 %	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

Beban Dibayar di Muka

C. 1.8. Beban Dibayar di Muka

Muka

Rp586,666,666

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar *Rp586,666,666* dan *Rp1,466,666,666* . Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Masih Harus Diterima

Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Persediaan Rp0

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Aset Tetap

C.2. Aset Tetap

Rp1,341,942,936

Saldo Aset Tetap Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1,341,942,936 dan Rp1,521,353,694. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp0

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tanah tempat kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di pinjam pakai kan kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 3059 Tahun 2022 tanggal 07 Oktober 2022 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor 279/KPU-PROV-010/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemanfatan Barang Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta berupa Tanah dan Bangunan kepada KPU Jakarta. Biaya Pemeliharaan tanah dan bangunan berikut biaya instalasi listrik air telepon dan internet sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

Peralatan dan **C.2.2. Peralatan dan Mesin**

Mesin
Rp3,322,366,079

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3,322,366,079 dan Rp3,032,262,744. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2025	
Mutasi Tambah:	0
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	0
Penghentian asset dari penggunaan	0
Saldo Per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	((2,199,027,385)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	((2,199,027,385)

Gedung dan **C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Bangunan Rp0

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tanah tempat kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di pinjam pakai kan kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 3059 Tahun 2022 tanggal 07 Oktober 2022 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor 279/KPU-PROV-010/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemanfatan Barang Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta berupa Tanah dan Bangunan kepada KPU Kota Jakarta Selatan. Biaya Pemeliharaan tanah dan bangunan berikut biaya instalasi listrik air telepon dan internet sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab oleh kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi tambah: Berupa penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025.

Aset Tetap Lainnya Rp398,015,000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp398,015,000 dan Rp398,015,000. Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(2,199,027,385)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(2,378,438,143) dan Rp(2,199,027,385). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

Tabel. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,322,366,079	(2,378,438)	
2	Gedung dan Bangunan			
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya	398,015,000		

Jumlah	3,720.381.079	(2,378,438,143)	
--------	---------------	-----------------	--

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk.
Panjang TA 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Tagihan TPA			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan		50%	
Macet		100%	
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			

Aset Lainnya
Rp500,000

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp500,000 dan Rp Rp750,000 . Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor KPU Kota Jakarta Selatan terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset tak Berwujud **C.4.1. Aset Tak Berwujud**

Rp 0

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 30 Juni 2025	
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	-

Aset Lain-Lain **C.4.2. Aset Lain-lain**

Rp564,477,888

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp564,477,888 dan Rp564,477,888 . Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 30 Juni 2025	
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(563,727,888)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	(563,727,888)

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(563,727,888)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp((563,727,888) dan Rp(263,656,513) Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	-	(563,727,888)	34,5
	Jumlah	-		
B.	Aset Lain-laim	564,477,888	(563,727,888)	
	Jumlah	564,477,888	(563,727,888)	34,5
Total				

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0.

Uang Muka dari
KPPN
Rp15,000,000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15,000,000 dan Rp0 , merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada

pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
Total		-

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada Treasury Notional Pooling (TNPJ) dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan. Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan Desember 2023 yang belum dibayarkan kepada para pegawai Kantor Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan per tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp 0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut

bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Barus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp1,793,816,280

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,793,816,280 dan Rp2,988,770,360 . Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP Rp656,200,000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp656,200,000 dan Rp87,379,682 . Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan,

pengelolaan BMN dan luran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**
Rp3,014,643,000

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2025 adalah masing-masing sebesar *Rp3,014,643,000* dan Rp 2,457,302,985 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel. Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji	3,014,643,000	2,650,801,350	1,1%
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah Beban	3,014,643,000	2,650,801,350	1,1%

Beban
Persediaan
Rp
10,390,829,672

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10,390,829,672 dan Rp Rp10,390,829,672. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	-

Beban Barang **D.4 Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa

Rp3,600,000

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2042 adalah masing-masing sebesar Rp3,600,000 dan Rp110,192,602,571Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan sebagai tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara online, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian sebagai sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
Beban Keperluan Perkantoran	3,600,000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	26,774,169,520
Beban Barang Operasional lainnya	-	32,650,000
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
Beban Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
Beban Honor Operasional Satker	-	104,306,400
Beban Honor Output Kegiatan	3,600,000	64,080,966,000

Beban Bahan	12,299,475,185	4,719,786,970
Beban Langganan Listrik	103,518,506	109,460,133
Beban Sewa	2,175,150,000	573,116,759
Beban Jasa lainnya	4,622,366,960	148,962,550
Beban Langganan Telepon	-	-
Beban Jasa Profesi	-	26,600,000
Jumlah Beban	110,192,602,571	29,550,978,538

Beban
Pemeliharaan
Rp63,085,154

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp63,085,154 dan Rp591,147,050 . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024

Tabel. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	2,866,000	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	60,219,154	
Jumlah	-	63,085,154	40%

Beban Perjalanan Dinas
Rp3,400,000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,400,000 dan Rp20,575,679,069 . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri.

Tabel. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,400,000	71,472,028	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	4,867,475,264	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	15,629,867,888	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	6,863,889	
Jumlah Beban	3,400,000-	20,575,679,069	57%

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial

TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial - dalam bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Beban			

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp296,136,681 . Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023.

Tabel. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024.

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	295,636,681	6%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	500,000	-
Jumlah Penyusutan	-	296,136,681	6%
Beban Amortisasi Software	-	-	15%
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	15%
Jumlah Beban	-	-	6%

Beban Penyisihan **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Piutang Tidak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kegiatan Non **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Operasional Rp0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp 0 dan 0 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	-	-	-
Selisih Kurs	-	-	
Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
Jumlah Beban	-	-	-

Pas Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas *Awal* **E.1 Ekuitas Awal**

Rp1,793,816,280

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar *Rp1,793,816,280* dan *Rp2,988,770,360*.

Defisit *LO* **E.2 Surplus/Defisit LO**

Rp(2,273,488,010)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar *Rp(**Rp(2,273,488,010)* *dan* *Rp(129,706,761,829)*. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0,

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp0*.

Penyesuaian Nilai **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan** *Aset Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar *Rp0* dan *Rp0* Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024.

Selisih Revaluasi **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset** *Aset Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar *Rp0* dan *Rp0*.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp136,924,759,885 . Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel. Transaksi Antar Entitas TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	Rp0

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar 0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp 1,793,816,280

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar *Rp 1,793,816,280* dan *Rp 2,988,770,360*.

D. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: 25 Tahun 2023, tanggal 9 Juni 2023, tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: 2 Tahun 2025 , tanggal 6 Januari 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar , Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dengan uraian Sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Sholehudin Zuhri
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen : Dyna Laura
 - c. Pejabat Penandatanganan SPM : Wiwit Tuswanti
 - d. Bendahara Pengeluaran : Indah Dian Rostianti
-
- 1. Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor 279/KPU-PROV-010/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemanfatan Barang Milik Gedung dan Bangunan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di pinjam pakai kan kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:3059 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 Daerah Pemprov DKI Jakarta berupa Tanah dan Bangunan kepada KPU Jakarta Selatan.
 - 2. KPU Kota Jakarta Selatan menerima alokasi anggran pemilu 2024 di dalam DIPA/RKAKL yang telah Revisi ke 17 (Tujuh Belas) dengan nomor SP DIPA – 076.01.2.656947/2024 tanggal 22 Januari 2025 sebesar Rp3,303,197,000.
 - 3. Penjelasan terkait dengan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) KPU Kota Jakarta Selatan hanya menggunakan Satu

rekening dengan Nomor Rekening 019301002497303 BPG:
133 KPU JAKSEL.

4. Menindalanjuti rekomendasi temuan BPK terkait pembayaran kelompok kerja Honorarium KPU Kota Jakarta Selatan (Terlampir).

F.2 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan

F.3 Setor Sisa TUP Tahun Anggaran 2025

VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

A. Laporan Keuangan Cetakan SAKTI

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (656947) KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:23 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,347,951,579	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	398,015,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,561,047,090
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	533,753,088	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	30,724,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	533,503,088
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	30,724,800
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	19,257,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,524,219,111
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	656,200,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	2,988,770,360
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	656,200,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	790,424,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,896	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48,925,134	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,806,208	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,084,893	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	38,961,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	140,794,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,830,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	852,483,665	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	167,972,366	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,343	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,641,860	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,044,628	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,410,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	10,271,570	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	35,319,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,500,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	762,988,473	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	166,721,800	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	35,523,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65,610,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	35,083,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	111,114,895	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,483,466,666	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (656947) KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:23 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	36,650,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,412,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51,224,460	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,400,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	362,019,705	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	500,000	0
JUMLAH			10,313,721,449	10,313,721,449

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

SHOLEHUDIN ZUHRI
NIP. 198508162010121004



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (656947) KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:23 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,466,666,666	(1,466,666,666)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	1,466,666,666	(1,466,666,666)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,347,951,579	3,322,366,079	25,585,500	0.77
Aset Tetap Lainnya	398,015,000	398,015,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,561,047,090)	(2,199,027,385)	(362,019,705)	16.46
JUMLAH ASET TETAP	1,184,919,489	1,521,353,694	(336,434,205)	(22.11)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	564,477,888	564,477,888	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(564,227,888)	(563,727,888)	(500,000)	0.09
JUMLAH ASET LAINNYA	250,000	750,000	(500,000)	(66.67)
JUMLAH ASET	1,185,169,489	2,988,770,360	(1,803,600,871)	(60.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	19,257,000	0	19,257,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19,257,000	0	19,257,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	19,257,000	0	19,257,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,165,912,489	2,988,770,360	(1,822,857,871)	(60.99)
JUMLAH EKUITAS	1,165,912,489	2,988,770,360	(1,822,857,871)	(60.99)
JUMLAH EKUITAS	1,165,912,489	2,988,770,360	(1,822,857,871)	(60.99)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,185,169,489	2,988,770,360	(1,803,600,871)	(60.35)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
SHOLEHUDIN ZUHRI
NIP 198508162010121004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (656947) KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:23 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,524,219,111
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	656,200,000	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	656,200,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	790,424,260	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,357	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48,925,134	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,806,208	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,084,893	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,961,960	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	121,537,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,830,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	852,483,665	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	167,972,366	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,343	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,641,860	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,044,628	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,410,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,271,570	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,319,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,500,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	762,988,473	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	166,721,800	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	35,523,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	65,610,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	35,083,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	111,114,895	0
3.0	522141	Belanja Sewa	16,800,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	36,650,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,412,100	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51,224,460	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,400,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,585,500	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,461
JUMLAH			4,180,420,572	4,180,420,572

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

SHOLEHUDIN ZUHRI
198508162010121004



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA JAKARTA SELATAN 656947

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:23 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	656,200,000	656,200,000	0	0	87,379,682	(87,379,682)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	656,200,000	656,200,000	0	0	87,379,682	(87,379,682)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	656,200,000	656,200,000	0	0	87,379,682	(87,379,682)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,530,384,000	3,524,219,111	(6,164,889)	100	132,017,497,000	131,731,874,401	285,622,599	100
1. Belanja Pegawai	3,121,942,000	3,120,816,056	(1,125,944)	100	2,677,453,000	2,661,201,350	16,251,650	99
2. Belanja Barang	382,844,000	377,817,555	(5,026,445)	99	129,340,044,000	129,070,673,051	269,370,949	100
3. Belanja Modal	25,598,000	25,585,500	(12,500)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA JAKARTA SELATAN 656947

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:23 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,530,384,000	3,524,219,111	(6,164,889)	100	132,017,497,000	131,731,874,401	285,622,599	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

* SOLEHUDIN ZUHRI
NIP 198508162010121004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (656947) KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:22 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,140,073,056	2,650,801,350	489,271,706	18.458
Beban Persediaan	0	10,390,829,672	(10,390,829,672)	(100)
Beban Barang dan Jasa	1,773,447,661	110,192,602,571	(108,419,154,910)	(98.391)
Beban Pemeliharaan	67,636,560	63,085,154	4,551,406	7.215
Beban Perjalanan Dinas	3,400,000	20,575,679,069	(20,572,279,069)	(99.983)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (656947) KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:22 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	362,519,705	296,136,681	66,383,024	22.416
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	5,347,076,982	144,169,134,497	(138,822,057,515)	(96.291)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,347,076,982)	(144,169,134,497)	138,822,057,515	(96.291)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	656,200,000	0	656,200,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	656,200,000	0	656,200,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	87,379,682	(87,379,682)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	87,379,682	(87,379,682)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	656,200,000	87,379,682	568,820,318	650.975
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,690,876,982)	(144,081,754,815)	139,390,877,833	(96.744)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,690,876,982)	(144,081,754,815)	139,390,877,833	(96.744)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS



SHOLEHUDIN ZUHRI
NIP 198508162010121004